



# EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN EXCAVATOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## POLICY EVALUATION OF EXCAVATOR USE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND REHABILITATION IN TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY

Frenco Elwadinata<sup>a\*</sup>, Muhammad Syurya Hidayat<sup>b</sup>, Erni Achmad<sup>b</sup>, Kadarusman<sup>a</sup>, Candra Dwi Putra<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Tanjung Jabung Timur

<sup>b</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jambi; Jambi

\*Korespondensi: [frencoelwadinata@tanjabtimkab.go.id](mailto:frencoelwadinata@tanjabtimkab.go.id)

### Info Artikel:

- Artikel Masuk: 26 Juni 2023
- Artikel diterima: 27 Juni 2024
- Tersedia Online: 30 Juni 2024

### ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pengembangan dan kemajuan suatu daerah. Dalam praktiknya untuk menunjang pembangunan infrastruktur dibutuhkan alat berat untuk mempermudah pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang program penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan. Namun selama program ini berjalan belum pernah dilakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder yang terlibat dalam program, serta mengevaluasi implementasi program penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan berdasarkan persepsi masyarakat dan stakeholder terkait. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengetahui peran stakeholder yang terlibat, dan metode kuantitatif dengan mengkombinasikan model evaluasi context, input, process, product, dan metode importance performance analysis untuk mengevaluasi efektivitas program. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kolaborasi antar perangkat daerah di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pengelolaan program kebijakan penggunaan excavator dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah yang berbeda-beda. Secara umum program penggunaan excavator ini belum berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur, Rehabilitasi Infrastruktur

### ABSTRACT

Infrastructure development is important in achieving development goals, such as equitable development in each region. Adequate infrastructure is one of the key factors in supporting the development and progress of an area. In practice, to support infrastructure development, heavy equipment is needed to facilitate the work. In 2012, the East Tanjung Jabung District Government issued Regent Regulation No. 6/2012 on the use of excavators for the construction/rehabilitation of infrastructure facilities and infrastructure managed by the District Government. However, the program has never been evaluated. This study aims to determine the role of stakeholders involved in the program and evaluate the implementation of the excavator use program for the construction/rehabilitation of infrastructure facilities and infrastructure managed by the sub-district government based on the perceptions of the community and related stakeholders. The research methods used in this research are qualitative methods to determine the role of stakeholders involved, and quantitative methods by combining the context, input, process, product evaluation model, and the importance-performance analysis method to evaluate program effectiveness. The results of this study are the collaboration between regional apparatus within the scope of East Tanjung Jabung Regency related to the management of the excavator use policy program with the duties and responsibilities of each different regional apparatus. In general, the excavator use program has not been effective by community expectations.

**Keywords:** Infrastructure Development, Infrastructure Rehabilitation, Policy Evaluation

## 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan secara substansial tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, kesejahteraan ini tercermin melalui peningkatan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan per kapita di suatu wilayah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan serta kemampuan dalam mengembangkan potensi daerah (Subur & Nuraini, 2022). Guna mempercepat pembangunan di suatu daerah, diperlukan berbagai faktor pendukung, termasuk sarana dan prasarana infrastruktur. Zhang & Cheng (2023) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi memiliki efek positif jangka panjang terhadap perekonomian. Penggunaan alat berat, seperti excavator, adalah salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Todaro et al. (2000) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang pada akhirnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pengembangan dan kemajuan suatu daerah. Tanpa infrastruktur yang baik, proses pembangunan cenderung terhambat dan hasilnya kurang optimal. Infrastruktur yang penting untuk menunjang ekonomi masyarakat mencakup berbagai fasilitas yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perkebunan. Infrastruktur transportasi, seperti jalan dan jembatan, sangat penting untuk mengangkut hasil perkebunan dari lokasi produksi ke pasar atau fasilitas pengolahan, memastikan aksesibilitas yang lancar terutama di daerah terpencil.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah daerah dengan berbagai programnya terus menjalankan program peningkatan produksi sektor ekonomi. Tentu saja, program yang dilakukan, sangat disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah masing - masing. Salah satu program yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat itu adalah pemberian bantuan excavator yang ditempatkan di tiap kecamatan. Program ini termasuk unik karena pertama kalinya dilakukan di Provinsi Jambi. Dengan digulirkannya program ini diharapkan dapat mengatasi sulitnya akses wilayah, terutama daerah yang masih minim dari sentuhan pembangunan.

Karakteristik ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbilang relatif unik. Dari sisi nilai PDRB, perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Secara struktural, perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh sektor pertambangan (38,76%) dan sektor pertanian (23,32%) (BPS Tanjung Jabung Timur, 2023). Dimana pada kedua sektor tersebut, peranan investasi dari sektor swasta sangat besar. Namun pada sisi lain, dari aspek ekonomi kerakyatan, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih banyak bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Perekonomian dengan karakteristik demikian membutuhkan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur, dalam rangka menjaga nilai tambah yang tercipta.

Dengan karakteristik geografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembukaan aksesibilitas kawasan dan penyediaan infrastruktur merupakan suatu hal yang sangat strategis. Kebijakan ini akan mempercepat konektivitas antara produsen dengan pasar serta memperkuat posisi tawar menawar petani pada suatu pasar. Infrastruktur merupakan unsur terpenting dalam pembangunan. Kondisi infrastruktur yang baik akan mempermudah untuk akses perpindahan barang dan juga mobilitas perekonomian suatu daerah (Nurmala & Hutagaol, 2022). Ketersediaan infrastruktur akan membuka akses masyarakat terhadap sumber daya, sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ritonga, 2020). Dalam praktiknya untuk menunjang pembangunan infrastruktur dibutuhkan alat berat untuk mempermudah pekerjaan. Penggunaan alat berat sangat mempengaruhi kemajuan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur. Kesalahan dalam memilih alat berat dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan biaya proyek jika harus dilakukan perbaikan atau pengadaan alat berat tambahan (Nugraha et al., 2017). Dengan penggunaan alat berat yang tepat maka akan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada

sehingga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dengan ditunjukkan dari adanya peningkatan *ouput*, serta dampak tidak langsung yakni mampu mendorong kenaikan aktifitas perekonomian yang akan meningkatkan modal baik bagi pihak swasta maupun pihak pemerintah serta dapat menyerap tenaga kerja yang berakibat pada kenaikan *output* (Kansil et al., 2023).

Untuk mendukung kebijakan terkait aksesibilitas dan infrastruktur tersebut, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 2012 tentang penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan. Dalam peraturan bupati ini dimuat mengenai ruang lingkup penggunaan excavator, pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemakaian excavator, tatacara pemakaian, prosedur hingga pengawasannya, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 terkait perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2012 yang memuat penggunaan excavator yang dikelola pemerintah kecamatan dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/kontraktor/swasta dengan dikenakan tarif retribusi.

Selama berlangsungnya program penggunaan excavator di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikelola oleh pemerintah kecamatan dari awal hingga kini program penggunaan alat berat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah tujuan dari program ini sudah tercapai atau belum, yaitu untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terkait hal tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. Evaluasi program penting dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasi sebuah program maupun kebijakan (Chehafudin et al., 2022). Disisi lain, dikutip dari laman berita nusantara News, Riyadi (2023) menuliskan, beberapa permasalahan yang dirasakan masyarakat terkait penggunaan excavator ini yaitu timbulnya kecemburuan sosial terkait penggunaan excavator antar desa, salah satunya yaitu di Kecamatan Nipah Panjang, dikarenakan excavator hanya berada di satu titik desa saja dalam waktu yang lama, sedangkan warga desa lain sangat membutuhkan excavator untuk memperbaiki tanggul, yang berguna untuk mengatur sirkulasi air yang masuk ke lahan, serta sumber kehidupan bagi masyarakat.

Evaluasi program merupakan rangkaian dari sebuah proses. Evaluasi dilihat secara eksplisit mengarah pada pencapaian tujuan, sedangkan evaluasi dilihat secara implisit harus membandingkan apa yang telah dicapai dengan suatu program terhadap apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditentukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program, adapun maksud dari kriteria keberhasilan yaitu pelaksanaan dan hasil atau proses itu sendiri dievaluasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Dengan evaluasi, derajat keberhasilan program dalam hubungannya dengan lingkungan program dapat diperiksa dengan keputusan apakah program diperpanjang, ditunda, diperbaiki, dikembangkan lebih lanjut, disetujui atau ditolak.

Kajian ini mengkombinasikan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dengan metode IPA (*Importance Performance Analysis*) dalam mengevaluasi implementasi program. Model CIPP dipilih karena kelebihanannya yaitu model ini dinilai lebih komprehensif dikarenakan objek evaluasi tidak hanya terbatas pada hasil, namun mencakup konteks, masukan (*input*), proses dan juga hasil. Namun kelemahan dari model ini adalah dalam pengukuran konteks, masukan dan hasil dalam arti luas melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan banyak biaya dan waktu (Darodjat & Muhammad, 2015). Metode IPA dipilih karena hasil dari metode ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian suatu program, serta program mana yang harus dipertahankan maupun ditingkatkan. Kelebihan metode IPA antara lain dapat menghasilkan gambaran yang jelas tentang elemen-elemen program dengan membandingkan tingkat kepuasan objek yang diteliti dan juga metode ini mudah digunakan. Namun metode ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak ada definisi yang jelas dari konsep *importance* dan *performance* serta tidak ada kriteria yang jelas tentang *variable* yang digunakan (Hermawan et al., 2021).

Kajian yang sejenis untuk mengevaluasi pelaksanaan program maupun kebijakan telah dilakukan antara lain oleh Cahyo (2017), Hakim et al. (2021) dan Hermawan et al. (2021) dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk melihat sejauh mana pencapaian suatu program ataupun kebijakan berdasarkan gap antara harapan dan realisasi program atau kebijakan. Luthfi et al (2020) dalam

penelitian evaluasi keberhasilan pelaksanaan infrastruktur jalan desa lebih menekankan pada aspek kualitatif untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dengan peraturan dan kebutuhan serta pendekatan kuantitatif untuk menghitung sejauh mana pemeliharaan infrastruktur dengan menghitung persentase kerusakan jalan. Winarno & Nugroho (2020) dengan penelitian evaluasi pengembangan kawasan industri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pembobotan dan skala likert untuk mengetahui persepsi masyarakat. Namun belum ada yang membahas pada tingkat evaluasi manajemen program, dalam hal ini menggunakan pendekatan model evaluasi *context, input, process, product* (CIPP) yang dikombinasikan dengan metode *Importance Performance Analysis* (IPA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program penggunaan excavator untuk pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan berdasarkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* terkait, serta untuk mengetahui keterkaitan peran *stakeholder* yang terlibat dalam program. Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan bidang perencanaan pembangunan wilayah sebagai penyedia data empiris untuk menyusun kebijakan pembangunan wilayah yang lebih efektif serta dapat digunakan untuk pengembangan model perencanaan penggunaan alat berat yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lain, dan juga peningkatan pemahaman tentang pentingnya penyesuaian alat berat dengan kondisi spesifik wilayah untuk mencapai hasil yang optimal.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan pada kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang bertujuan untuk menghimpun pendapat dari semua elemen yang dapat mewakili semua *stakeholders* (masyarakat, pemerintah, dan LSM) yang terkait dengan gambaran, serta keterkaitan antar *stakeholders* dalam program tersebut, kemudian yang kedua menggunakan kuesioner berupa kuesioner dengan jawaban semi tertutup, menggunakan skala likert (*range* 1 sampai 5) terkait harapan dan persepsi responden terhadap atribut indikator evaluasi program. Data sekunder diperoleh dari penelusuran data yang sudah ada baik data dari instansi terkait ataupun data dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua *stakeholder* yang terkait dengan program penyelenggaraan pemakaian alat berat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel untuk kajian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Ismayani, 2019). Secara umum, sampel akan dibagi kedalam dua kelompok yaitu sampel yang mewakili instansi pemerintah yakni Dinas PUPR, Bappeda, Bakeuda, dan DPRD Tanjung Jabung Timur masing-masing diwakili 3 orang, inspektorat daerah selaku auditor 1 orang, pemerintah kecamatan 55 orang, kelurahan 16 orang, dan pemerintah desa 13 orang, yang semuanya memiliki keterkaitan dengan program bantuan alat berat ini. Sampel yang mewakili masyarakat yakni masyarakat pengguna program 22 orang, tokoh masyarakat pengguna program 22 orang, dan LSM 3 orang, sehingga total jumlah sampel sebanyak 144 orang. Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rincian responden dapat dilihat pada Tabel. 1.

**Tabel 1.** Sebaran Responden dalam Pengumpulan Data

Unsur	Instansi/Responden	Jumlah Responden (orang)	
Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>• Badan Keuangan Daerah</li> <li>• Dinas PUPR</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• DPRD</li> <li>• Pemerintah Kecamatan</li> <li>• Pemerintah Kelurahan</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul>	97	
	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)</li> </ul>	47
		Total	144

2.2. Metode Analisis

Untuk mengetahui peranan dan keterlibatan semua *stakeholder* dalam program penggunaan alat berat digunakan pendekatan metode kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif, Model evaluasi yang digunakan dalam kajian kebijakan ini adalah Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model ini merupakan model yang paling dikenal dan paling banyak digunakan. Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam (2003), model ini berasal dari singkatan:

- C = *Context evaluation* (merupakan evaluasi terhadap konteks)
- I = *Input evaluation* (merupakan evaluasi terhadap masukan)
- P = *Process evaluation* (merupakan evaluasi terhadap proses)
- P = *Product evaluation* (merupakan evaluasi terhadap hasil).

Keempat kata CIPP tersebut pada hakikatnya merupakan butir-butir penilaian dan merupakan bagian dari suatu program atau kebijakan. Dengan kata lain, model ini merupakan model penelitian evaluasi yang memandang bahwa program yang dilakukan evaluasi merupakan sebuah sistem. Model ini memiliki kecenderungan pendekatan pada evaluasi manajemen program (Jazuli, 2020). Model tersebut kemudian dikombinasikan dengan *importance performance analysis* (IPA). Penelitian kebijakan adalah penelitian untuk kepentingan pembuatan kebijakan. Majchrzak dalam Ibrahim (2018) menyatakan bahwa riset kebijakan adalah metode penelitian yang mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang mendasar dan membantu pembuat keputusan memberikan arahan yang berorientasi pada tindakan atau perilaku pragmatis dalam memecahkan suatu masalah dimensi, indikator, dan atribut CIPP dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Dimensi, Indikator dan Atribut yang Digunakan

Dimensi	Indikator	Atribut
Context (implementasi program)	Kebutuhan Program	1. Pada tahun 2012 dirasakan terjadi ketidakmerataan pembangunan antar kecamatan
		2. Pada tahun 2012 memang dirasa perlu dilakukan rehabilitasi sarana prasarana serta infrastruktur
Input	Relevansi rancangan program	3. Relevansi rancangan program terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012
		4. Relevansi rancangan program terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019

Dimensi	Indikator	Atribut	
Process	Strategi yang dipilih	5. Ketepatan strategi yang dipilih dalam mengatasi masalah infrastruktur tahun 2012	
		6. Ketepatan prosedur berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012	
	Prosedur dan desain	7. Ketepatan prosedur berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019	
		8. Camat	
	Kompetensi SDM	9. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa	
		10. Sekretaris	
		11. Staff pengelola program	
	Daya dukung sarana dan prasarana	12. Operator	
		13. Teknisi	
		14. Bengkel	
	Process	Implementasi	15. <i>Sparepart</i>
			16. Implementasi Program Berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012
		Realisasi program	17. Implementasi Program Berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019
			18. Pembangunan/rehab tanggul
			19. Pembangunan/rehab waduk/telaga/embung
20. Pembangunan/rehab saluran sungai			
21. Pembangunan/rehab pembentukan badan jalan baru			
22. Pembangunan/rehab penanganan bencana alam			
23. Pembangunan/rehab fasilitas umum			
Product			Dampak umum
	Dampak khusus	25. Rehabilitas sarana dan prasarana (tanggul, waduk, telaga, embung, saluran, sungai, badan jalan baru, penanganan bencana alam, fasum)	
	Dampak positif	26. Aksesibilitas/infrastruktur jalan membaik	
		27. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	
		28. Peningkatan produksi pertanian	
		29. Peningkatan penggunaan tenaga kerja	

Sumber: Tim Peneliti, 2021

Penerapan penelitian kebijakan pada penelitian ini digunakan untuk mensinkronisasikan kebijakan peraturan bupati terkait penggunaan excavator untuk menunjang pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Pendekatan IPA digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan. Pendekatan IPA pada dasarnya merupakan metode yang dipergunakan untuk memahami kepuasan masyarakat dengan menilai tingkat harapan terhadap tingkat realisasinya (Purnomo & Riandadari, 2015). Metode ini dipilih karena dengan menggunakan metode ini dapat melihat sejauh mana pencapaian program, serta yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan suatu program maupun kebijakan. IPA dilakukan dengan menghitung skor total kinerja program dan kenyataan maupun harapan. Selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata skor kinerja dan rata-rata skor kenyataan maupun harapan (Hermawan et al., 2021).

Dalam penelitian ini pendekatan IPA digunakan untuk memperoleh nilai kesenjangan antara kebijakan penggunaan excavator dengan realisasi, terutama terkait dengan *context, input, process, dan product*. IPA mempunyai dua variabel yang digambarkan dalam huruf X dan Y, di mana X merupakan realisasi di lapangan, sedangkan Y merupakan arahan kebijakan penggunaan excavator. Arahan kebijakan penggunaan excavator merupakan arahan yang tertuang dalam indikasi program penggunaan excavator, sedangkan realisasi merupakan perwujudan pelaksanaan program di lapangan. Adapun formulasi untuk menaksir tingkat kesenjangan dapat dilihat sebagai berikut:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Defenisi variabel adalah sebagai berikut: Tki adalah derajat/tingkat kesenjangan, Xi ialah nilai realisasi, dan Yi adalah nilai kebijakan.

Analisis tingkat kesesuaian menentukan skala prioritas yang digunakan dalam mengolah hasil analisis kuadran. Adapun kriteria penilaian dari suatu tingkat kesesuaian pengguna menurut Santoso & Anwar dalam Pamungkas et al. (2019) adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil analisis kesesuaian >100 persen berarti kepuasan masyarakat melebihi tingkat harapan yang diinginkan. Disini dapat diartikan bahwa masyarakat merasa sangat puas.
2. Jika hasil analisis kesesuaian =100 persen, dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat sudah mencapai tingkat harapan yang diinginkan. Disini dapat diartikan responden telah merasa puas.
3. Jika hasil analisis kesesuaian <100 persen berarti masyarakat tidak mencapai tingkat kepuasan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat mengartikan bahwa responden tidak puas.

<b>Kuadran 4</b> Prioritas Utama	<b>Kuadran 1</b> Pertahankan Kinerja
<b>Kuadran 3</b> Prioritas Rendah	<b>Kuadran 2</b> Berlebihan

Sumber: Mudjanarko et al. (2020)

**Gambar 1.** Kuadran Kepentingan

Pendekatan selanjutnya adalah memetakan semua variabel di empat (4) kuadran, yang mana:

1. Kuadran 4 (prioritas utama) merupakan area yang memuat arahan kebijakan penggunaan excavator tetapi realisasinya arahan tersebut belum sesuai dengan ekspektasi (ambang kepuasan masih rendah). Variabelnya harus ditingkatkan pada kuadran ini.
2. Kuadran 1 (pertahankan kinerja) merupakan area arahan kebijakan penggunaan excavator dan realisasinya dirasakan sudah sesuai sehingga derajat kepuasannya tinggi. Pada kuadran ini variabelnya perlu dipertahankan.
3. Kuadran 3 (prioritas rendah) merupakan area yang memuat arahan kebijakan penggunaan excavator yang diperkirakan kurang penting dan kenyataannya kurang berpengaruh. Variabel pada kuadran ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan kembali dikarenakan manfaatnya dirasakan bagi masyarakat sangat kecil.
4. Kuadran 2 (berlebihan) merupakan area yang memuat arahan kebijakan penggunaan excavator yang dirasa kurang penting dan terlalu berlebihan. Untuk di kuadran ini variabel yang ada harus dipangkas agar tidak terjadi tumpang tindih.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Program dan *Stakeholder* yang Terlibat

Program penggunaan excavator untuk menunjang pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur ini diluncurkan tidak terlepas dari istimewanya bentang alam pesisir timur Provinsi Jambi. Topografi daerah ini pada umumnya dataran rendah yang terdiri dari rawa/gambut dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut, hal ini menyulitkan petani dalam mengangkut dan menjual hasil panen dikarenakan akses infrastruktur jalan yang tidak memadai akibat pembangunan yang belum merata, sementara jika menggunakan jalur perairan untuk mengangkut hasil panen dari lahan pertanian dan perkebunan, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu iklim perairan pesisir timur sering juga dilanda perubahan cuaca yang ekstrim. Seringkali perkebunan warga terendam air laut Ketika waktu pasang tiba, yang menyebabkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat rusak dan gagal panen.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan program kebijakan penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikelola pemerintah kecamatan yang tertuang didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2012 yang memuat ruang lingkup pemakaian, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, tata cara pemakaian, prosedur pembiayaan, serta pengawasan program. Pada awalnya dalam peraturan ini, excavator tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pihak swasta, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2012, terkait penggunaan excavator untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola pemerintah kecamatan dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/kontraktor/swasta dengan dikenai tarif retribusi, hal yang mendasari keluarnya aturan ini adalah untuk menutupi biaya perawatan dan pemeliharaan excavator yang cukup besar.

Berdasarkan temuan di lapangan, pada awalnya masyarakat sangat mendukung program ini demi pemerataan pembangunan serta perbaikan sarana prasarana penunjang infrastruktur dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/kontraktor/swasta, namun setelah munculnya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 terkait program bantuan excavator yang dikelola oleh pemerintah kecamatan dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/kontraktor/swasta dengan dikenakan tarif retribusi muncul pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai bahwa program bantuan ini harus dikembalikan kepada niat awal dari program bantuan excavator ini, yaitu murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak dikenakan tarif retribusi, dan juga ketika pihak swasta diberikan akses untuk dapat mempergunakan excavator, maka waktu antri yang diperlukan masyarakat umum untuk dapat menggunakan alat ini akan semakin lama, dikhawatirkan waktu penanganan untuk kepentingan perbaikan infrastruktur pertanian maupun perkebunan masyarakat menjadi terhambat. Disisi lain ada juga sebagian yang tidak memperlakukan hal ini, dikarenakan pertimbangan untuk menutupi biaya perawatan dan operasional excavator yang besar.

Dari jenis bantuan excavator tidak dapat disamaratakan antar wilayah, dan harus di petakan kembali kebutuhan jenis excavator berdasarkan permasalahan wilayah, karena tiap kecamatan memiliki permasalahan dan kebutuhan excavator yang berbeda. Penggunaan alat berat dalam sebuah pekerjaan bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat proses penyelesaian suatu proyek kegiatan, namun ada kalanya produktivitas alat berat menjadi kurang optimal, yang disebabkan karena penggunaan alat yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan (Jaya & Sutandi, 2019). Analisis yang cermat dan pemetaan kebutuhan alat berat berdasarkan kondisi spesifik tiap kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat guna. Dengan memilih alat berat yang sesuai, efisiensi dan efektivitas pekerjaan dapat ditingkatkan, menghindari penundaan dan biaya tambahan yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak tepat. Kesalahan dalam memilih alat berat dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan biaya proyek jika harus dilakukan perbaikan atau pengadaan alat berat tambahan (Nugraha et al., 2017).

Dalam penggunaan excavator juga diatur prosedur serta tata cara penggunaannya. Pengguna excavator (masyarakat/desa/lembaga) harus ditetapkan melalui keputusan camat yang diusulkan melalui lembaga pengelola. Agar dapat menggunakan excavator, pengguna harus mengajukan permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui camat serta melampirkan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun pendistribusian pengguna excavator ke desa-desa menjadi tanggung jawab camat dengan batas waktu yang telah ditentukan kemudian. Dalam penggunaan excavator, juga harus dibuatkan kontrak perjanjian antara otoritas lembaga pengelola dan peminjam, yang harus diketahui camat. Penganggaran dana operasional excavator dituangkan dalam penyusunan RKA SKPD terkait, untuk dana operasional excavator dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran rutin melalui camat sebagai penanggung jawab dalam hal pengelolaan alat. Dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasan excavator dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan pemerintah kecamatan.

Adapun terkait wewenang dan tanggung jawab program ini dibagi menjadi 4 antara lain:

1. Wewenang dan tanggung jawab kabupaten, meliputi penetapan kebijakan lokus pemakaian, memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan excavator (operator dan mekanik), memberikan bantuan dana operasional kepada kecamatan dalam hal pemakaian alat berat;
2. Wewenang dan tanggung jawab kecamatan, meliputi menetapkan dan membentuk lembaga pengelola excavator (camat sebagai penanggung jawab, kasi PMD sebagai ketua, sekretaris, dan 2 orang anggota diambil dari staf kecamatan), memberikan persetujuan kontraktual antara lembaga pengelola dengan masyarakat pengguna, bertanggung jawab atas keselamatan dan perawatan excavator, membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan excavator baik fisik maupun keuangan;
3. Wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola, meliputi bertanggung jawab terhadap operasional excavator baik mobilisasi dan demobilisasi, bertanggung jawab atas keamanan excavator beserta peralatan didalamnya, serta bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan;
4. Wewenang dan tanggung jawab masyarakat pemakai excavator, meliputi mengusulkan kepada camat melalui lembaga pengelola terhadap lokasi yang akan dibangun, memelihara, merawat dan menjaga excavator selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

Prosedur dan tata cara penggunaan excavator dinilai masyarakat sudah cukup baik, dengan alur proses mulai dari pengajuan proposal sampai ke penggunaan excavator yang tidak merepotkan. Namun dari perspektif pihak pengelola program, terkait pengelolaan excavator terkendala pada jumlah dan kompetensi SDM pengelola yang dirasa masih sangat minim pengetahuan terkait dengan alat berat excavator, sehingga dibutuhkan peran lebih dari dinas teknis yaitu Dinas PUPR dalam hal pengelolaan dan pengawasan. Dengan kendala yang dihadapi pengelola, ada baiknya pengelolaan terkait perawatan dan operasional excavator dilimpahkan kepada Dinas PUPR dalam hal ini UPTD, dengan pertimbangan kompetensi SDM yang dimiliki UPTD Dinas PUPR terbiasa dan memiliki kemampuan untuk mengelola excavator. Pihak kecamatan tetap dilibatkan dalam penentuan lokus kegiatan, karena pihak kecamatan sebagai pengelola wilayah yang dinilai mengetahui kondisi wilayahnya.

### 3.2. Analisis Tingkat Kesenjangan

Pada dasarnya sebuah program ataupun kebijakan diluncurkan oleh pemerintah untuk dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Tentunya, dengan peluncuran program tersebut akan memunculkan ekspektasi masyarakat bahwa program atau kebijakan tersebut mampu menjadi solusi serta menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Namun pada kenyataannya, ekspektasi yang muncul tidak selalu akan terpenuhi. Perbedaan atau selisih antara ekspektasi/harapan dengan kenyataan/realisasi inilah yang memunculkan gap/kesenjangan. Untuk mengukur selisih suatu kinerja terhadap ekspektasi/harapan yang diinginkan digunakan analisis gap/tingkat kesenjangan (Sulaiman et al., 2018).

Pada analisis tingkat kesenjangan ini, yang menjadi indikator kinerja untuk dapat dikatakan sudah baik adalah jika tingkat kesenjangan bernilai positif dan begitupula sebaliknya kinerja dikatakan kurang baik adalah jika tingkat kesenjangan bernilai negatif (Nasution et al., 2018). Adapun hasil perhitungan analisis kesenjangan ditampilkan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Dimensi, Indikator dan Atribut yang Digunakan

Dimensi	Indikator	Atribut Pertanyaan	Harapan	Persepsi	Gap	Persentase
Context (implementasi program)	Kebutuhan program	1. Pada tahun 2012 dirasakan terjadi ketidakmerataan pembangunan antar kecamatan	3,61	3,66	0,06	101,58
		2. Pada tahun 2012 memang perlu dilakukan rehabilitasi sarana prasarana serta infrastruktur	4,13	4,34	0,21	105,02
	<b>Rata-rata</b>		<b>3,61</b>	<b>3,66</b>	<b>0,06</b>	<b>101,58</b>
	Input	Relevansi rancangan program	3. Relevansi rancangan program terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012	4,13	4,21	0,08
4. Bagaimana relevansi rancangan program terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019			3,06	3,58	0,52	117,06
Strategi yang dipilih		5. Ketepatan strategi yang dipilih dalam mengatasi masalah infrastruktur tahun 2012	4,06	3,79	-0,27	93,31
		Prosedur dan desain	6. Ketepatan prosedur berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012	3,94	3,98	0,04
7. Ketepatan prosedur berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019			3,14	3,48	0,34	110,93
Kompetensi SDM			8. Camat	3,57	3,69	0,12
		9. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa	3,57	3,26	-0,31	91,20
		10. Sekretaris	3,57	3,14	-0,43	88,00
		11. Staff pengelola program	3,57	3,16	-0,41	88,40
Daya dukung sarana dan prasarana		12. Operator	3,91	3,79	-0,11	97,07
		13. Teknisi	3,91	1,63	-2,28	41,68
		14. Bengkel	3,91	1,25	-2,66	31,99
		15. Sparepart	3,91	1,28	-2,63	32,72
<b>Rata-rata</b>		<b>3,71</b>	<b>3,09</b>	<b>-0,62</b>	<b>83,40</b>	

Dimensi	Indikator	Atribut Pertanyaan	Harapan	Persepsi	Gap	Persentase	
Process	Implementasi	16. Implementasi program berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012	3,91	3,83	-0,08	97,99	
		17. Implementasi program berdasar Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019	3,45	3,51	0,06	101,86	
	Realisasi program	18. Pembangunan/rehab tanggul	3,99	4,11	0,12	103,05	
		19. Pembangunan/rehab waduk/telaga/embung	2,51	2,08	-0,44	82,67	
		20. Pembangunan/rehab saluran sungai	1,76	2,49	0,73	141,30	
		21. Pembangunan/rehab pembentukan badan jalan baru	3,50	2,69	-0,81	76,94	
		22. Pembangunan/rehab penanganan bencana alam	2,59	1,76	-0,82	68,23	
		23. Pembangunan/rehab fasilitas umum	3,45	3,02	-0,43	87,58	
	<b>Rata-rata</b>			<b>3,14</b>	<b>2,94</b>	<b>-0,21</b>	<b>93,41</b>
	Product	Dampak umum	24. Terjadi pengurangan ketimpangan pembangunan	3,43	3,68	0,25	107,29
Dampak khusus		25. Rehabilitas sarana dan prasarana (tanggul, waduk, telaga, embung, saluran, sungai, badan jalan baru, penanganan bencana alam, fasum)	4,06	4,07	0,01	100,18	
		26. Aksesibilitas/infrastruktur jalan membaik	3,44	3,31	-0,13	96,27	
Dampak positif		27. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	3,62	3,74	0,11	103,16	
		28. Peningkatan produksi pertanian	3,96	3,93	-0,03	99,28	
		29. Peningkatan penggunaan tenaga kerja	3,34	3,09	-0,24	92,72	
<b>Rata-rata</b>			<b>3,642</b>	<b>3,637</b>	<b>0,005</b>	<b>99,87</b>	

Sumber: Data Diolah, 2022

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata harapan masyarakat serta *stakeholder* terkait terhadap program penggunaan alat berat ini lebih tinggi dibanding realitasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa program penggunaan alat berat ini secara umum belum berjalan efektif. Dari 4 dimensi yang ada, hanya dimensi *context* dengan indikator kebutuhan masyarakat terhadap program penggunaan excavator yang memiliki

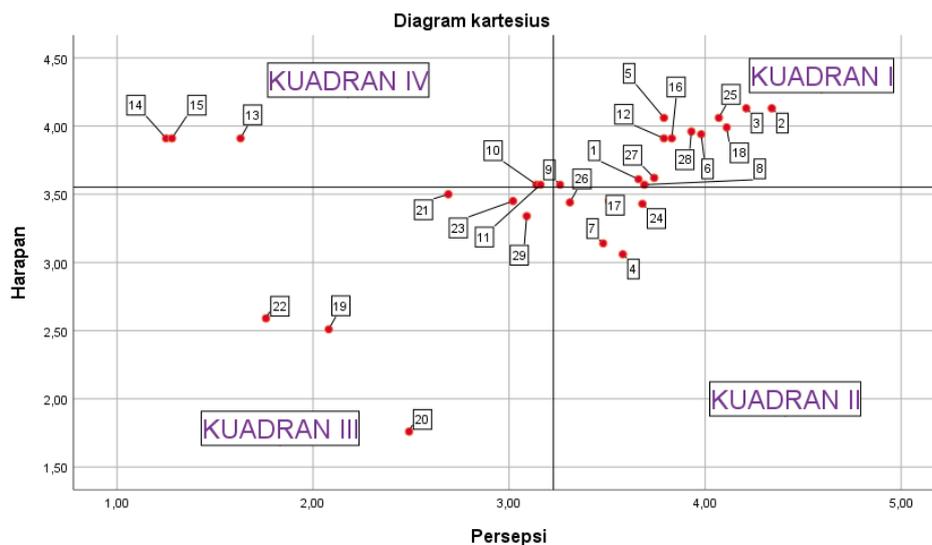
nilai positif. Adapun tujuan utama dari penilaian *context* adalah untuk menentukan manfaat dan kelemahan target, apakah organisasi, program, khalayak sasaran, ataupun orang (Ahyan et al., 2023). Dilihat dari hasil analisis kesesuaian pun diperoleh rata-rata persentase nilai > dari 100, yang menandakan bahwa kepuasan masyarakat melebihi tingkat harapan yang diinginkan atau dapat diartikan bahwa masyarakat merasa sangat puas pada dimensi *context*. Ekonomi masyarakat Tanjung Jabung Timur yang banyak bergerak dibidang pertanian dan perkebunan memang sangat membutuhkan excavator untuk merehab ataupun memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu dan dapat berjalan lancar.

Dimensi lain yang memiliki rata-rata nilai kesenjangan negatif paling tinggi adalah dimensi *input*, yang mana dimensi ini bertujuan untuk mendukung perencanaan program agar dapat menghasilkan modifikasi yang diperlukan (Ahyan et al., 2023). Adapun atribut dari dimensi *input* ini antara lain ketepatan strategi, kompetensi SDM pengelola program, serta daya dukung sarana dan prasarana. Dilihat dari hasil rata-rata analisis kesesuaian pun diperoleh nilai < dari 100, yang memberi arti bahwa masyarakat tidak mencapai tingkat kepuasan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan diperoleh informasi bahwa strategi program pemberian bantuan excavator kepada pemerintah kecamatan ini tidak diikuti dengan pendanaan yang memadai untuk operasional dan perawatan excavator, apalagi dengan kondisi excavator yang sudah berumur tua semakin membutuhkan biaya yang besar untuk perawatan, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang mengharuskan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19. Temuan permasalahan kompetensi SDM sangat memprihatinkan, beberapa SDM lembaga pengelola banyak yang tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan alat berat, bahkan ada yang tidak memahami isi peraturan bupati yang mengatur tentang program penggunaan alat berat, selain itu kurangnya jumlah pegawai yang ada di kecamatan juga mempengaruhi kualitas pengelolaan dari lembaga pengelola program. Terkait daya dukung sarana prasarana masih sangat minim, tiap excavator kecamatan sudah memiliki operator masing-masing, namun untuk teknisi, *sparepart*, dan bengkel tidak tersedia dan jika excavator mengalami kendala harus mendatangkan teknisi dan *sparepart* dari luar kota yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Dimensi *input* memerlukan perbaikan dengan segera agar dapat mengurangi nilai kesenjangan dan nilai kesesuaian. Tentu hal paling mendasar yang perlu segera diperbaiki adalah kompetensi SDM lembaga pengelola program, karena dengan meningkatnya kompetensi serta pengetahuan SDM lembaga pengelola akan dapat membuat pengelolaan program ini dapat berjalan efektif, efisien serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan program. Dari hasil penelitian Kurdi & Abrar (2022), dan juga Maryadi & Misrania (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja pegawai. Disamping itu, hal yang tidak kalah penting yaitu perlunya penyediaan daya dukung sarana prasarana terkait teknisi, *sparepart* dan bengkel excavator minimal ada di tingkat kabupaten.

### 3.3. Efektivitas Program Penggunaan Excavator

Dalam mengukur efektivitas program penggunaan digunakan metode IPA (*importance performance analysis*). Menurut Nugraha et al. (2014), analisis IPA dapat digunakan untuk mengurutkan komponen yang berbeda dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan. Dari hasil pengukuran efektivitas penggunaan excavator dapat terpetakan dari Gambar 2.



Sumber: Data Diolah, 2023

**Gambar 2.** Diagram Kartesius Efektivitas Pelaksanaan Program

Atribut terkait efektivitas pelaksanaan program pada Kuadrant I ada 13 atribut yang terkait dengan beberapa dimensi efektivitas antara lain dimensi *context* dengan indikator kebutuhan program, dimensi *input* dengan indikator relevansi rancangan program terhadap Peraturan Bupati, strategi yang dipilih, prosedur dan desain (ketepatan prosedur berdasarkan Peraturan Bupati), kompetensi SDM camat dan Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dimensi dan daya dukung sarana dan prasarana (operator), dimensi proses dengan indikator implementasi dan realisasi program serta dimensi *product* dengan indikator dampak khusus dan dampak positif. Atribut yang berada pada kuadrant I ini dapat diartikan bahwa atribut pada area tersebut persepsi arahan kebijakan penggunaan excavator dan realisasinya dirasakan sudah sesuai sehingga derajat kepuasannya tinggi. Pada kuadrant ini variabelnya serta atributnya perlu dipertahankan.

Pada Kuadrant II, dimensi yang ada pada area ini yaitu dimensi *input* dengan indikator relevansi rancangan program terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 dan ketepatan prosedur dan desain berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019, dimensi *process* dengan indikator implementasi program berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019, serta dimensi *product* dengan indikator dampak umum (terjadi pengurangan ketimpangan pembangunan) dan dampak positif (aksesibilitas/infrastruktur jalan membaik). Atribut yang ada pada area kuadrant ini dapat diartikan pelaksanaan kinerjanya dilakukan dengan sangat baik dan memuaskan, namun masyarakat menganggap tidak terlalu penting.

Dimensi yang berada pada kuadrant III adalah dimensi *process* dengan indikator realisasi program (pembangunan/rehab waduk/telaga/embung, pembangunan/rehab saluran/sungai, pembangunan/rehab pembentukan badan jalan baru, pembangunan/rehab penanganan bencana alam, pembangunan/rehab fasilitas umum), dan juga dimensi *product* dengan indikator dampak positif (peningkatan penggunaan tenaga kerja). Area pada kuadrant ini memberi arti bahwa persepsi arahan kebijakan penggunaan excavator yang diperkirakan kurang penting dan kinerjanya termasuk dalam kategori biasa atau cukup.

Dimensi yang ada pada area kuadrant IV, dapat diartikan bahwa area ini memuat persepsi arahan kebijakan penggunaan excavator yang realisasi kebijakan tersebut belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat (ambang kepuasan masih rendah). Atribut dalam variabel yang ada pada area kuadrant ini harus difokuskan untuk perbaikannya dan lebih ditingkatkan lagi, karena atribut-atribut di area ini dinilai masyarakat sangat penting untuk diprioritaskan perbaikannya. Dimensi yang masuk area kuadrant ini hanya dimensi *input* dengan indikator kompetensi SDM dan daya dukung sarana dan prasarana.

Sejalan dengan analisis kesenjangan dan analisis kesesuaian, pemetaan ukuran prioritas dengan menggunakan diagram IPA pun terlihat hasil yang sama, yaitu pada kuadran IV terdapat indikator yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan, yaitu pada indikator kompetensi SDM serta daya dukung sarana dan prasarana. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan Mahatama et al. (2021) tentang evaluasi program pembangunan infrastruktur dengan dana desa di Kabupaten Karangasem bahwa terdapat fakta permasalahan kurangnya kompetensi SDM, sedangkan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan program dana desa sehingga diperlukannya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial. Begitu juga penelitian Luthfi et al (2020) tentang evaluasi keberhasilan pelaksanaan infrastruktur jalan desa terkait dengan pendanaan dana desa Kabupaten Purbalingga juga menemui kendala yang sama yaitu kualitas SDM pelaku desa yang masih rendah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur jalan desa.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* yang terkait dengan program ini yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah yang menyusun perencanaan; Badan Keuangan Daerah terkait masalah keuangan; kecamatan (sebagai pembentuk lembaga pengelola program) yang memiliki wewenang pemberian persetujuan kontraktual antara lembaga pengelola dan pengguna alat; lembaga pengelola program yang mempunyai tanggung jawab terkait operasional excavator; dan Dinas PUPR sebagai fungsi pengawas program bersama pemerintah kecamatan.

Dilihat dari analisis kesenjangan dan analisis kesesuaian secara umum program ini belum berjalan efektif, dikarenakan mayoritas dimensi yang dievaluasi memiliki nilai kesenjangan negatif yang artinya terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan masyarakat dengan realita yang terjadi. Analisis kesesuaian pun menunjukkan mayoritas hasil nilai yang diperoleh mayoritas dimensi <100, yang menandakan bahwa masyarakat tidak mencapai tingkat kepuasan atas realisasi program sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya dimensi *context* yang menunjukkan nilai kesenjangan positif dan nilai kesesuaian >100, yang berarti realita yang terjadi sudah melebihi harapan dari masyarakat. Dari kuadran diagram IPA dapat dipetakan atribut yang perlu diprioritaskan dalam perbaikan yaitu pada atribut kompetensi SDM dan daya dukung sarana prasarana.

Adapun saran atau rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah, Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku dinas teknis agar ikut berperan dan bertanggung jawab atas ketersediaan teknis, bengkel dan *sparepart* excavator, dan juga lebih berperan aktif ikut dalam pengawasan penggunaan excavator, pihak kecamatan agar segera mengusulkan SDM pada lembaga pengelola untuk diikutsertakan pelatihan teknis dan manajerial terkait pengelolaan excavator agar dapat meningkatkan kompetensi, sementara waktu hingga SDM pada lembaga pengelola yang ada di kecamatan dinilai sudah memiliki kompetensi terkait pengelolaan excavator, untuk pengelolaan terkait perawatan dan operasional excavator dilimpahkan kepada Dinas PUPR, namun pihak kecamatan tetap dilibatkan dalam penentuan lokus kegiatan, dikarenakan pihak kecamatan sebagai pengelola wilayah yang dinilai mengetahui kondisi wilayahnya, serta hendaknya dipetakan kembali kebutuhan jenis excavator tiap-tiap wilayah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan dapat menjadi perhatian bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya membahas terkait efektivitas implementasi program dengan membandingkan antara persepsi dan harapan dari *stakeholder* terkait program ini, namun tidak sampai pada analisis kelayakan maupun nilai ekonomis dari excavator tersebut. Sehingga perlu kiranya untuk kedepan dilakukan pengembangan penelitian excavator ini dari sisi kelayakan alat dan nilai ekonomisnya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan, terutama kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas segala dukungan selama ini hingga terselesaikannya penelitian dan tulisan ini. Penelitian ini didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur melalui anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021.

## 6. REFERENSI

- Ahyan, N. A. M., Sumadi, S. A., Pairan, M. R., Jambari, H., & Hazirah, N. (2023). Evaluation of Agricultural System Design Unit in Design and Technology Subjects Using CIPP Model: A Preliminary Study. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12(1), 1585–1605. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v12-i1/16403>.
- BPS Tanjung Jabung Timur. (2023). *Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka*.
- Cahyo, D. N. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Bidang Irigasi Kecil. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 13(2), 175–188.
- Cehafudin, M., Wibawa, S., & Wibowo, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum serta Sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 374–387. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i1.94>.
- Darodjat, & Muhammad, W. (2015). Model Evaluasi Program Pendidikan. *Islamadina*, XIV(1), 1–28.
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>.
- Hermawan, I., Izzaty, Budiyanti, E., Sari, R., Sudarwati, Y., & Teja, M. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Jaya, W., & Sutandi, A. (2019). Analisis Produktivitas Alat Berat Mesin Bor Auger, Crawler Crane, dan Excavator pada Proyek A dan B. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.24912/jmts.v2i1.3030>.
- Jazuli, A. (2020). Evaluasi Context, Input, Process, dan Product pada Pencapaian Kebijakan Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 61. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.61-73>.
- Kansil, K. K., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2023). Analisis Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(8), 121–132.
- Kurdi, M., & Abrar, U. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 115–120. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v8i1.7829>.
- Luthfi, A., Ismiyati, & Hermawan, F. (2020). Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Infrastruktur Jalan Desa Terkait dengan Pendanaan Dana Desa Kabupaten Pubalingga. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(1), 25–39. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i1.22237>.
- Mahatama, I. K. B. W., Jaya, N. M., & Putera, I. G. A. A. (2021). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur dengan Dana Desa di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Spektran*, 9(2), 115. <https://doi.org/10.24843/spektran.2021.v09.i02.p03>.
- Maryadi, Y., & Misrania, Y. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(1), 58–67.
- Mudjanarko, S. W., Sulastris, D., & Wahyuni, A. (2020). *Metode Importance Performance Analysis (IPA) untuk Mengukur Kinerja Prasarana Kereta Api Melalui Kepuasan Pelanggan*. Scopindo Media Pustaka.
- Nasution, L., Aknuranda, I., & Rachmadi, A. (2018). Evaluasi Situs Web Pemerintah Menggunakan Metode Webqual Dan Importance-Performance Analysis (IPA)(Studi Kasus: Situs Kecamatan Lowokwaru-Malang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(11), 4377–4384.
- Nugraha, D., Iriana, R. T., & Djuniati, S. (2017). Analisis Biaya dan Produktivitas Pemakaian Alat Berat pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Siak IV Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau*, 5(1), 1–10.
- Nugraha, R., Ambar, H., & Adianto, H. (2014). Usulan Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa pada Bengkel “X”

- Berdasarkan Hasil Matrix Importance-Performance Analysis (Studi kasus di Bengkel AHASS PD. Sumber Motor Karawang). *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 1(3), 221–231.
- Nurmala, N., & Hutagaol, M. P. (2022). Membandingkan Pengaruh Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia Serta Implikasi Kebijakan. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 9(3), 188–207. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i3.34834>.
- Pamungkas, R. A., Alfarishi, E., Aditiarna, E., Mukhlisin, A., & Aziza, R. F. A. (2019). Analisis Kualitas Website SMK Negeri 2 Sragen dengan Metode Webqual 4.0 dan Importance Performance Analyst (IPA). *Jurnal Tekno Kompak*, 13(1), 12. <https://doi.org/10.33365/jtk.v13i1.220>.
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6. (2012). *Penggunaan Excavator untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Dikelola Pemerintah Kecamatan*.
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6. (2019). *Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Excavator Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Dikelola Pemerintah Kecamatan*.
- Purnomo, W., & Riandadari, D. (2015). Analisa Kepuasan Pelanggan Terhadap Bengkel dengan Metode IPA (Importance Performance Analysis) di PT. Arina Parama Jaya Gresik. *JTM*, 03(03), 54–63.
- Ritonga, F. S. (2020). Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau. *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(1), 42–52.
- Riyadi. (2023). Miris, Alat Berat Jenis Excavator Kecamatan Sadu Terkesan Terbangkalai. *TransTV45*.
- Stufflebeam, D. L. (2003). *International Handbook of Educational Evaluation*. Springer.
- Subur, M. C. I., & Nuraini, I. (2022). Evaluasi Keberhasilan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 239–250. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20478>.
- Sulaiman, A. H., Aryadita, H., & Pinandito, A. (2018). Evaluasi Kualitas Layanan Website Pemerintah Kota Batu dengan Metode E-Govqual dan Importance Performance Analysis (IPA). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu*, 2(2), 493–502.
- Todaro, M. P., Munandar, H., & Sumiharti, Y. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (7th ed.). Erlangga.
- Winarno, B., & Nugroho, P. (2020). Evaluasi Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 16(1), 12–24. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i1.21655>.
- Zhang, Y., & Cheng, L. (2023). The Role of Transport Infrastructure in Economic Growth: Empirical Evidence in the UK. *Transport Policy*, 133(February), 223–233. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.01.017>.